



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782  
LAMARAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [djpt@kkp.go.id](mailto:djpt@kkp.go.id)

Nomor : B.3462 /DJPT.2/TU.330/X/2024 31 Oktober 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan Rapat Evaluasi Laporan *Pilot Project Transshipment*

Yth. (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan kegiatan *Pilot Project Transshipment di Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, Indonesia berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan *Pilot Project* tersebut. Oleh karena itu, kami akan melaksanakan evaluasi pelaksanaan *Pilot Project Transshipment* yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Rabu , 6 November 2024  
waktu : pukul 10.30 WITA - selesai  
tempat : Ruang Rapat ATLI PU.Benoa,  
Jl. Raya Pelabuhan Benoa, Pedungan, Denpasar  
Selatan, Bali  
acara : a. Evaluasi Laporan *Pilot Project Transshipment*  
b. Pembahasan mengenai rekomendasi perbaikan pelaporan

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Saudara untuk hadir tepat waktu pada kegiatan dimaksud. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Vitri Yanti (WhatsApp: +62815-8887-850).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Kepala Pusat Riset Perikanan, BRIN

Lampiran Surat

Nomor : B.3462 /DJPT.2/TU.330/X/2024

Tanggal : 31 Oktober 2024

### DAFTAR NAMA YANG DIUNDANG

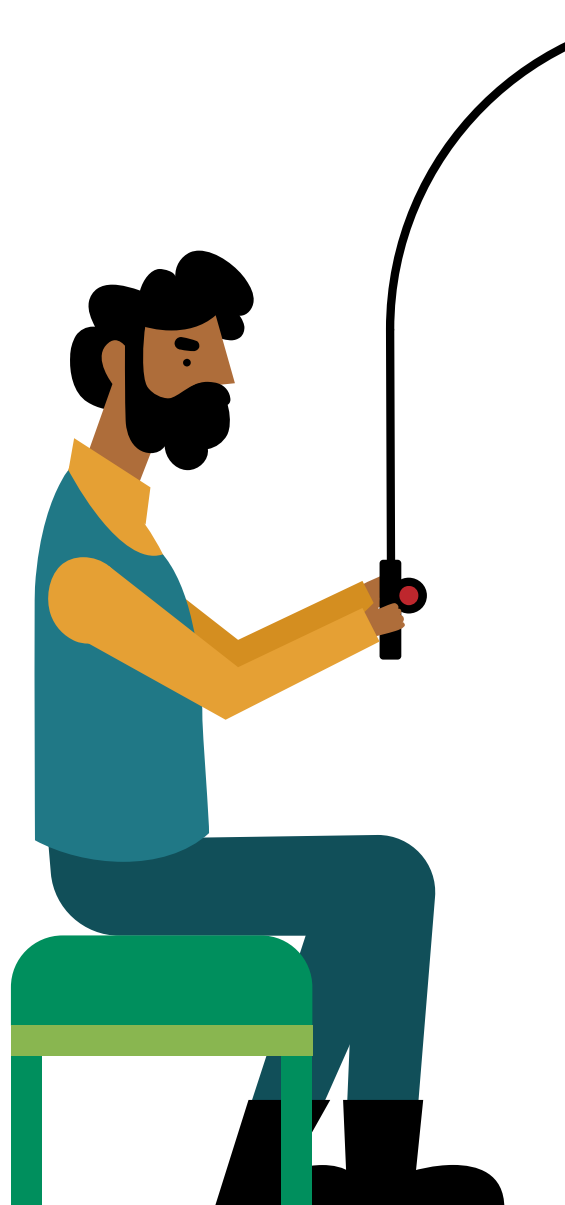
1. Ketua Tim Kerja Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Dit.Pengelolaan SDI – Ditjen PT
2. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan ZEEI dan Laut Lepas
3. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial, Dit.PSDI
4. Agustinus Anung Widodo P, M.Si., Peneliti Madya pada Pusat Riset Perikanan, BRIN
5. Staf Tim Kerja Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Dit. PSDI
6. Asosiasi Tuna Longline Indonesia
7. Asosiasi Perikanan Tangkap Terpadu (Aspertadu)
8. PT. Bandar Nelayan
9. PT. Charly Wijaya Tuna
10. PT. Intimas Surya
11. PT. Kilat Mandiri Jaya
12. PT. Perintis Jaya Internasional
13. PT. Putra Jayakota
14. PT. Sumber Mina Samudera
15. PT. Pahala Bahari Bali
16. PT. Bandar Benoa Bali
17. PT. Golden Tuna
18. PT. Nagamas Perkasa Nusantara
19. Fegi Arief Wijarnako (observer)
20. Kasim Permana (observer)

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan,



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Ridwan Mulyana



# RESOLUTION 24/04 RESOLUTION 24/05

Yayan Hernuryadin, S.Pi, M.S.E, Ph.D  
Ketua Tim Kerja Pemantauan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal  
Pengangkut Ikan

Jakarta, Agustus 2024

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan  
©2024



# Introduction

# Program Observer on Board

## Kriteria Kapal untuk Penempatan Observer

1. Kapal *Purse Seine* dan *Long Line* di laut lepas
2. Kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPP-NRI (>30 GT):
  - a) Kelompok pancing.
  - b) Kelompok jaring lingkaran, jaring angkat, dan jaring insang
3. Kapal pengangkut ikan yang beroperasi WPP-NRI & LL.
4. Lainnya:
  - a) Kapal penangkap ikan yang direkomendasikan untuk verifikasi laporan LBPI nya.
  - b) Kapal penangkap/ pengangkut ikan diusulkan untuk keperluan riset/tujuan tertentu (**termasuk FIP/MSK**)

**Note :** untuk pemindahan hasil tangkapan di area konvensi RFMOs, dilakukan oleh observer regional yang telah memiliki standar RFMOs.

## Dasar Hukum Pelaksanaan:

1. Peraturan Menteri KP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan
2. Peraturan Menteri KP Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Taat Kelola Pengawasan Kapal Perikanan;
3. Perdirjen PT No. 12/PER-DJPT/2018 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan
4. Resolusi RFMO



## Jumlah Observer (existing)

- *Observer* Reguler (aktif) = 70 org

## Permasalahan/Tantangan:

- Kapasitas (kualitas dan kuantitas) observer.
- Jumlah Pengelola/Management masih minm 8 org
- Kualitas data dan analisis data.
- Efektivitas penempatan observer.
- Kepatuhan Pelaku Usaha/Pemilik Kapal.
- Pembiayaan.

6 kebutuhan dalam penempatan observer di atas kapal yaitu:

## Kebutuhan RFMOs

1. Pemenuhan coverage level RFMOs → SC data,
2. *Pilot project* transshipment di IOTC dan CCSBT,

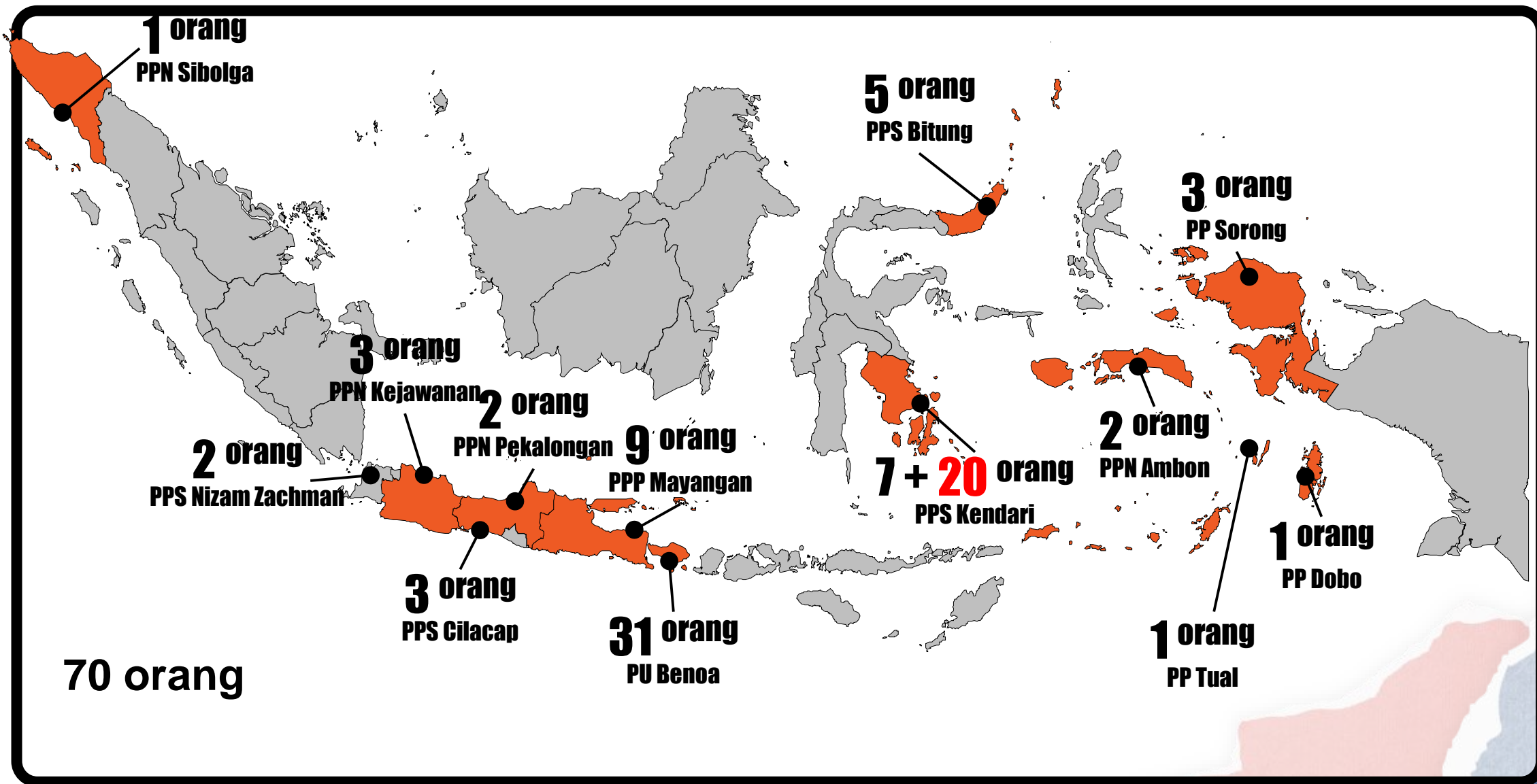
## Kebijakan Prioritas

3. Dukungan terhadap kegiatan prioritas KKP seperti penangkapan ikan terukur dan PNBK Pasca Produksi;
4. Verifikasi hasil laporan *Log Book* Penangkapan Ikan (LBPI)

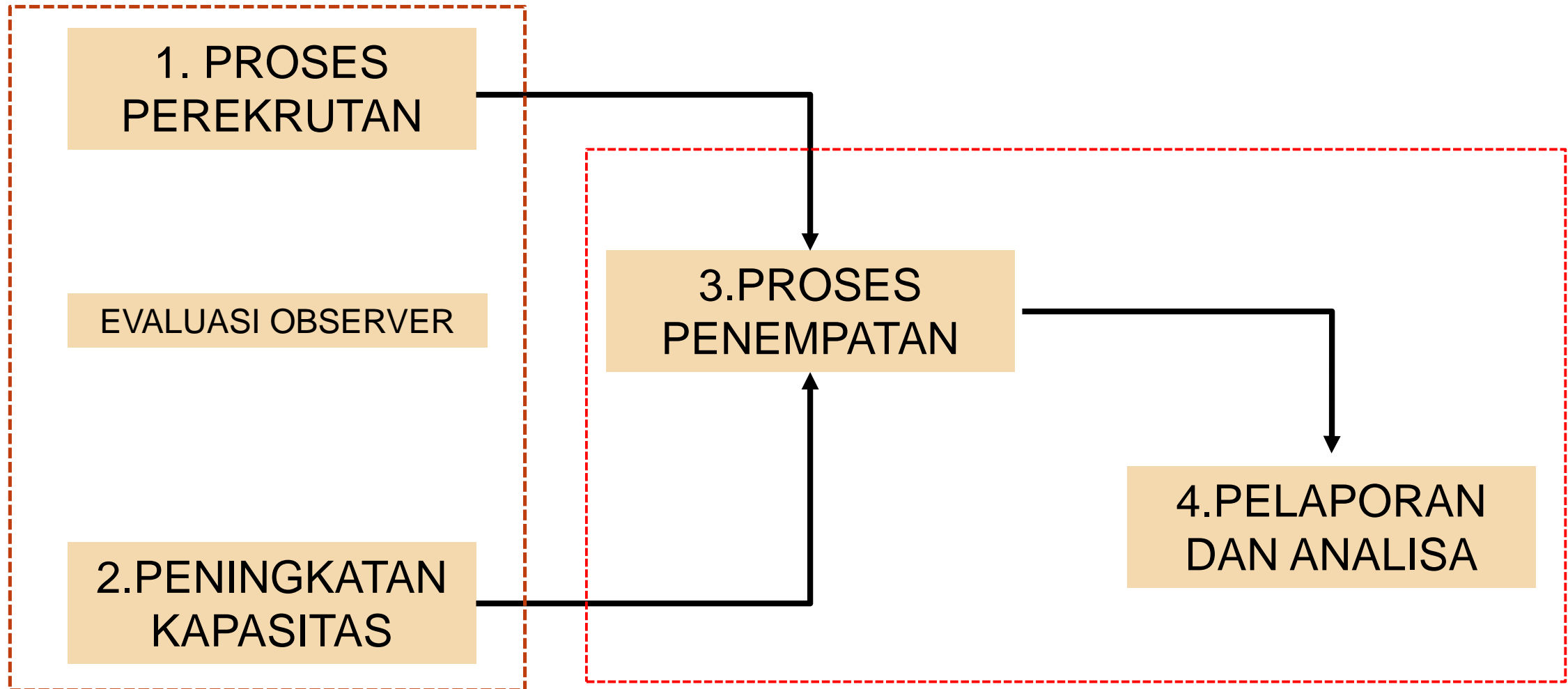
## Kebutuhan Keberlanjutan SDI & Market

5. Dukungan penyusunan Harvest Strategy Tuna di Perairan Kepulauan
6. Dukungan terhadap Fisheries Improvement Program dan sertifikasi MSC

# Lokasi Penempatan Pemantau Tahun 2024



## TAHAPAN KEGIATAN OBSERVER



**Resolusi IOTC 24/05**

# Kenapa transshipment di laut perlu diatur?

1. Memberantas IUU Fishing
2. Memonitor efektivitas Langkah-Langkah Konservasi dan Pengelolaan (CMMs) yang telah diadopsi oleh IOTC
3. Tuna laundering yang diangkut oleh kapal-kapal berizin
4. Mengumpulkan data untuk LSTVS untuk keperluan pengkajian stok tuna

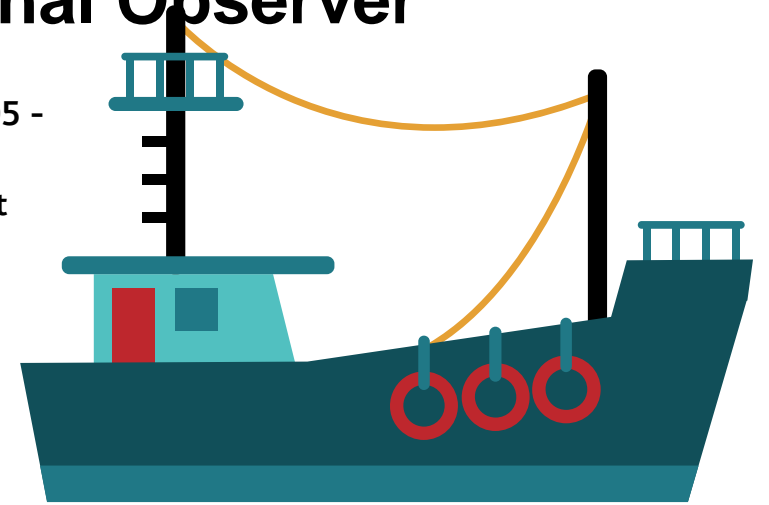
# Apa yang diatur dalam resolusi transshipment?

1. Seluruh kegiatan transshipment ikan tuna dan sejenis tuna serta hiu yang ditangkap berkaitan dengan perikanan tuna dan sejenis tuna di wilayah kompetensi IOTC wajib dilakukan di Pelabuhan.
2. Pelabuhan mencakup terminal lepas pantai dan instalasi lain untuk pendaratan, pemindahan muatan, pengemasan, pemrosesan, pengisian bahan bakar atau pasokan ulang (sebagaimana didefinisikan oleh Perjanjian Tindakan Negara Pelabuhan FAO).
3. Dilarang melakukan transshipment di laut terhadap ikan tuna dan spesies sejenis tuna serta hiu oleh kapal penangkap ikan selain LSTLV.
4. Kapal Tuna Skala Besar (LSTV) – berarti kapal penangkap ikan yang menargetkan tuna dan spesies sejenis tuna di area kompetensi IOTC yang memiliki panjang keseluruhan 24 meter ke atas dan tercatat dalam Catatan Kapal Resmi IOTC (IOTC RAV).

# Alasan Indonesia mengajukan observer nasional

1. Kapal Kayu tidak eligible ditempatkan observer IOTC (non convention vessels). Namun pada kenyataan secara historical banyak kapal-kapal pengangkut ikan berbahan kayu mengangkut hasil tangkapan ikan fresh/frozen.
2. Tidak ada hukum internasional maupun nasional yang melarang kapal kayu mengangkut hasil tangkapan fresh/frozen.
3. Oleh karena itu perlu memasukkan kapal kayu dalam resolusi agar eligible mengangkut hasil tangkapan fresh/frozen.

# ROP For Transhipmen at Sea by National Observer



- Revisi proposal IOTC 17/06 -> 19/06
- Perpanjangan Pilot Project
- Berlaku 2 tahun

- Revisi proposal IOTC 21/02 -> 22/06
- Perpanjangan Pilot Project
- 17 kapal pengangkut ikan Indonesia berbahan kayu

- Revisi proposal IOTC 23/05 - > 24/05
- Perpanjangan Pilot Project
- 20 kapal pengangkut ikan Indonesia berbahan kayu

2019

2022

2024

2017

2021

2023

2025







- Revisi proposal IOTC -> 17/06
- Pilot Project: 8 kapal pengangkut ikan Indonesia berbahan kayu
- menggunakan observer nasional
- Berlaku 2 tahun

- Revisi proposal IOTC 19/06 -> 21/02
- Perpanjangan Pilot Project
- 12 kapal pengangkut ikan Indonesia berbahan kayu
- Berlaku 2 tahun

- Revisi proposal IOTC 22/06 - > 23/05
- Perpanjangan Pilot Project
- 17 kapal pengangkut ikan Indonesia berbahan kayu
- Berlaku 2 tahun

- **TARGET:** Pilot Project integrasi ke dalam ROP IOTC dan CCSBT
- Semua kapal pengangkut ikan Indonesia berbahan kayu
- Berlaku sejak.....
- Perpanjangan Pilot Project
- 20 kapal pengangkut ikan Indonesia berbahan kayu

# RESOLUTION 24/05 ON ESTABLISHING A PROGRAMME FOR TRANSHIPMENT BY LARGE-SCALE FISHING VESSELS

-  Tujuh belas (17) + (3) kapal pengangkut ikan Indonesia berbahan kayu yang telah terdaftar di IOTC dan CCSBT dapat menggunakan observer nasional menggantikan observer regional.
-  Tujuh belas (17) + (3) kapal pengangkut ikan tersebut hanya boleh melakukan transshipment at sea dari kapal penangkap ikan Indonesia
-  Observer nasional harus dilatih setidaknya sesuai standar salah satu RFMO dan harus melaksanakan semua tugas dan fungsi observer regional, termasuk kebutuhan data dan pelaporan sesuai standar ROP.
-  Penggantian kapal pengangkut tersebut hanya dapat dilakukan jika kapal pengganti berbahan kayu dan kapasitas atau palkah tidak lebih dari yang diganti, serta ijin kapal yang telah diganti harus dicabut.
-  Pilot project transshipment at sea di IOTC mulai berlaku sejak tahun 2017 dan terakhir diperpanjang di tahun 2023 kemudian dievaluasi tiap tahun dan berakhir pada 2024, sedangkan di CCSBT mulai berlaku sejak 1 November 2024 hingga 31 Oktober 2026.
-  Pilot project tidak dapat diperpanjang lagi dan ditargetkan untuk diintegrasikan ke dalam IOTC dan CCSBT ROP di tahun 2025.

Resolusi IOTC 24/04

# IOTC Resolution 24/04

## ROS

1. “observer” means a person who collects information on board fishing vessels, in the framework of observer programs, and can be used *inter alia* for monitoring fishing activities, quantifying species composition of target species and bycatch, whether they are retained or discarded and deploying or collecting tags.
2. “Electronic Monitoring System” (EMS) means an integrated system of hardware and software that supports acquisition of video footages of fishing activity, positional data and/or sensor, that allows the analysis and reporting of EM records
3. “Pool of observers” means a list of IOTC recognised observers that have been allocated an IOTC registration number and trained according to IOTC standards who may be called upon by other flag States.
4. The objective of the IOTC Regional Observer Scheme (ROS) shall be to collect verified catch data and other scientific data related to the fisheries for tuna and tuna-like species in the IOTC area of competence
5. In order to improve the collection of scientific data, each CPC shall ensure that all fishing vessels of 24 meters length overall and above and under 24 meters if they operate outside the exclusive economic zone (EEZ) of the flag CPC and in the IOTC area of competence comply with the minimum observer coverage of 5%, as defined by the number of operations/sets
6. Providing CPCs meet the minimum mandatory ROS data reporting standards, the minimum human observer coverage provided for in paragraph 3 may be complemented or substituted by means of an EMS. To ensure the minimum mandatory ROS data reporting standards are met, where applicable and in line with the recommendation of the IOTC Scientific Committee on the outcomes from the ROS review of minimum data standards, the EMS shall be complemented by port sampling and/or other Commission approved data collection methods.

# IOTC Resolution 24/04

## ROS

Observers shall:

- record and report fishing activities, verify positions of the vessel;
- observe and estimate catches as far as possible with a view to identifying catch composition and bycatch and to monitoring discards including their fate (e.g. released alive) and size frequency;
- record the gear type, mesh size and attachments employed by the master;
- collect information to enable the cross-checking of entries made to the logbooks (species composition and quantities, live and processed weight and location, where available); and
- carry out such scientific work (e.g. collecting samples), as requested by the IOTC Scientific Committee

# IOTC Resolution 24/04

## ROS

Each observer shall provide, within 30 days of completion of each trip, a report to the flag CPC of the vessel. If the vessel was fishing in the EEZ of a coastal State, the part of the observer report covering fishing activities in the EEZ shall be also submitted to that coastal State.

Each CPC shall provide, to the IOTC Secretariat within 150 days the latest, each report and observer data, following IOTC observer reporting templates and standards. The Executive Secretary shall make the information available to the IOTC Scientific Committee.

No.	REQUIREMENTS	ASSESSMENTS	PROGRESS
	<b>AUTHORISED CARRIER VESSELS (CV)</b>	<b>Meets ROP standard</b>	
<b>1</b>	Fleets provide list of CVs authorized to receive tuna and tuna-like species and sharks	<b><u>YES</u></b>	<b>YES</b>
<b>2</b>	Establishes/signs MoU with owner/operator of CVs.	<b><u>PARTIAL</u></b>	<b>Yes</b> , Indonesia has submitted the MoU to the Secretariat in January 2023 and completely in April 2024

No.	REQUIREMENTS	ASSESSMENTS	PROGRESS
	<b>OBSERVER</b>		
3	Observers training.	<b><u>PARTIAL</u></b>	<b>Yes</b> , Indonesia has submitted certificate of observer training to the Secretariat as many as 32 certificates of the 35 observers <b>(P)</b>
4	Secretariat's approval of observers. Secretariat's maintains list of approved observers.	<b><u>NO</u></b>	<b>Yes</b> , Indonesia has submitted and updated list of observers to the Secretariat every time there was any new request of observer deployment
5	Certified medical fitness for working on CVs.	<b><u>PARTIAL</u></b>	<b>Yes</b> , We have submitted certificate of medical fitness to the Secretariat as many as 27 certificates of the 35 observers <b>(P)</b>

No.	REQUIREMENTS	ASSESSMENTS	PROGRESS
	<b>DEPLOYMENT OF OBSERVERS.</b>		
6	Deployment request approved by the Secretariat.	<b><u>NO</u></b>	<b>Yes</b> , we have submitted deployment request to the Secretariat
7	Plan and deploy observer onboard CVs.	<b><u>PARTIAL</u></b>	<b>Yes</b> , we have submitted deployment request to the Secretariat completely
8	Secretariat informed of updates of transshipment schedule.	<b><u>NO</u></b>	<b>Yes</b> , Indonesia has submitted the updating of transshipment schedule <b>(P)</b>

No.	REQUIREMENTS	ASSESSMENTS	PROGRESS
	<b>FROM THE OBSERVER ONBOARD CV</b>		
9	Observer checks/inspects each fishing vessel and monitor the transshipment operations, in accordance with Annex VI of Resolution 23/05.	<b><u>PARTIAL</u></b>	<b>Yes</b> , observer checked/inspected each fishing vessel and monitor the transshipment operations and has submitted the report to the Flag State to be evaluated <b>(P)</b>
10	Submission of 5 days reports	<b><u>NO</u></b>	<b>Yes</b> , Indonesia has submitted 5 days reports. However, the observer cannot submit on time because the electronic reporting system to submit the reports on carrier vessels are not available. They tried to use Radio, but sometimes became delay because of weather condition. <b>(P)</b>

No.	REQUIREMENTS	ASSESSMENTS	PROGRESS
	<b>REPORTING BY FISHING VESSELS</b>		
<b>11</b>	Pre-transshipment notification.	<b><u>YES</u></b>	<b>Yes</b> , the vessels sent pre-transshipment notification
<b>12</b>	Owner/Operator/Master of fishing vessel submits transshipment declaration.	<b><u>YES</u></b>	<b>YES</b> , Owner/Operator/Master of fishing vessel submitted transshipment declaration. However, it cannot be submitted on time because the electronic reporting system not available on board. They tried to use Radio, but sometimes became delay because of weather condition.

No.	REQUIREMENTS	ASSESSMENTS	PROGRESS
	<b>DURING THE CV TRIP REPORTING OF CARRIER VESSELS</b>		
<b>13</b>	Owner/Operator/Master of CV submits transshipment declaration to flag State and Secretariat	<b><u>NO</u></b>	<b>YES</b> , Owner/Operator/Master of CV submitted transshipment declaration to Flag State and Secretariat , it cannot be submitted on time because the electronic reporting system not available on board. They tried to use Radio, but sometimes became delay because of weather condition. <b>(P)</b>
<b>14</b>	Owner/Operator/Master of CV submits landing declaration.	<b><u>YES</u></b>	<b>Yes</b> , Owner/Operator/Master of CV submitted landing declaration.

No.	REQUIREMENTS	ASSESSMENTS	PROGRESS
	<b>REPORTING OBLIGATIONS</b>  <b>OBSERVERS REPORTS</b>		
15	Submission of observer report compiling the information collected, in accordance with the paragraphs 5 of Annex IV of Resolution 23/05, to Secretariat.	<u><b>NO</b></u>	<b>Yes</b> , Indonesia submitted observer report compiling the information collected to the Secretariat.
16	Database is maintained.	<u><b>NO</b></u>	<b>Yes</b> , Indonesia starts to establish database this year and plan to be finished at the end of this year. Currently, we use the google drive to share data and information to the Secretariat <b>(P)</b>
17	Possible infractions are highlighted.	<u><b>PARTIAL</b></u>	We will record and share if there is possible infraction <b>(P)</b>

<b>No.</b>	<b>REQUIREMENTS</b>	<b>ASSESSMENTS</b>	<b>PROGRESS</b>
	<b>FLEETS ANNUAL REPORTING OBLIGATIONS</b>		
<b>18</b>	Annual report on the implementation of the pilot project.	<b><u>YES</u></b>	<b>Yes, we</b> submitted annual report on the implementation of the pilot project

Terima  
Kasih

